

## **Analisis Collaborative Government dalam Meningkatkan Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sumbawa**

**Nurhasanah<sup>1</sup>, Ica Indah<sup>2</sup>, Muhammad Kamil<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang  
email: [ulfriandysetiawan99@gmail.com](mailto:ulfriandysetiawan99@gmail.com)<sup>1</sup>, [ghentageatovani08080@gmail.com](mailto:ghentageatovani08080@gmail.com)<sup>2</sup>, [kamil@umm.ac.id](mailto:kamil@umm.ac.id)<sup>3\*</sup>

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine and at the same time find out how the Collaborative Government Analysis in Improving Community Economic Recovery during the Pandemic Period. The focus of this research is Sumbawa Regency as the object of its study. This research is a structured literature review with data sources obtained through several reading sources such as journals, mass media and online media. In increasing the economic recovery of the community during the Covid - 19 Pandemic, it will certainly require collaboration from the Government (Collaborative Government). Where Collaborative Governance is one solution of a rigid bureaucracy and is not in the recovery of socio-economic conditions in the new normal era. So the Sumbawa Regency government as a policy maker provides an innovation in improving the economic recovery of the community during the Covid-19 pandemic with the Sumbawa Regency Government Policy in Improving Community Economic Recovery through MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), such as the first seven PEN programs, JPS ( Social Safety Net), secondly there is business capital assistance for 20 Ultra Micro entrepreneurs (UMI), third is facilitated by licensing subsidies for KUMKM, fourth facilitates halal certification, fifth is assistance from micro business actors (BPUM) or presidential assistance (Banpres), sixth is empowerment UMKM, then the last one is the economic stimulus program. And also with the use of digital technology, these SMEs can reach a wider market, cutting costs. As well as the emergence of many UMKM digital marketing platforms to support the process and performance of these MSMEs because it is seen from the development and development in the form of this infrastructure, of course, public access to develop their business through a digital system is expected to run well.*

**Keywords:** Collaboration; Government; Economy; Society

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sekaligus mengetahui bagaimana terkait Analisis Collaborative Government dalam Meningkatkan Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi. Pada focus penelitian ini menjadi Kabupaten Sumbawa sebagai objek kajiannya. Penelitian ini merupakan sebuah kajian pustaka terstruktur dengan sumber data diperoleh melalui beberapa sumber bacaan seperti jurnal, media massa maupun media online. Dalam meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid – 19 ini tentu akan memerlukan kolaborasi dari Pemerintah (Collaborative Governmance). Dimana Collaborative Governmance merupakan salah satu solusi dari birokrasi yang kaku dan tidak dalam pemulihan kondisi social ekonomi di era new normal. Maka pemerintah Kabupaten Sumbawa selaku pembuat kebijakan memberikan suatu inovasi dalam meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic Covid – 19 dengan adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Meningkatkan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), seperti tujuh program PEN Pertama, JPS (Jaring Pengaman Sosial), kedua adanya bantuan modal usaha bagi 20 pelaku usaha Ultra Mikro (UMI), ketiga difasilitasi subsidi perizinan bagi KUMKM, keempat memfasilitasi sertifikasi halal, kelima bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) atau bantuan presiden (Banpres), keenam adanya pemberdayaan UMKM, kemudian yang terakhir yakni adanya program stimulus ekonomi. Dan juga dengan adanya pemanfaatan teknologi digital, UKM ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas, dapat memangkas biaya. Serta banyak munculnya platform digital marketing UMKM guna untuk mendukung proses dan kinerja dari UMKM tersebut karena dilihat dari pengembangan dan pembangunan yang berupa infrastruktur ini, tentunya akses masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui sistem digital diharapkan dapat berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Kolaborasi; Pemerintah; Ekonomi; Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

Collaborative Governance yang di definisikan sebagai Pemerintah terlibat dalam forum resmi yang diikuti oleh LSM dan atau masyarakat yang bertujuan untuk mencapai mufakat dalam suatu persoalan bersama, LSM dan atau masyarakat tersebut bukan hanya berpartisipasi namun juga berkolaborasi serta ada pembagian peran yang jelas. Collaborative Governance adalah pemerintahan yang disusun dengan melibatkan badan publik dan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan public atau mengelola program public, serta asset public (Chris Ansel & Alison Gash, 2007). Disisi lain, Penjelasan tersebut menegaskan bahwa berbagai bentuk kerja sama, interaksi di pemerintahan, maupun resolusi konflik di berbagai aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung akan menerima dampak dari penyelenggaraan pemerintahan. (Irawan, 2017).

Dalam hal pemulihan ekonomi nasional di Kabupaten Sumbawa menimbulkan banyak sekali persepsi mengenai hal ini. Terkait dengan perekonomian, maka akibat dari munculnya covid-19 ini akan sangat berdampak bagi pelaku UMKM, dikarenakan sektor inilah yang paling rentan terpapar pandemi covid-19 ini. Oleh karena itu di kajian ini lebih dikhususkan terhadap sektor UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah). Hal ini dikarenakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian suatu daerah (Triandra et al., 2019). Selain itu, Pemerintah dapat melakukan program pemulihan ekonomi melalui berbagai cara yakni pengalokasian belanja Negara dengan memberikan subsidi bunga bagi kelompok pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdampak Covid-19 dan sudah berupaya melakukan restrukturisasi kreditnya pada perbankan, mengajukan keringanan pada perusahaan pembiayaan agar mendapat atau memperoleh fasilitas subsidi bunga untuk keringanan cicilan, penundaan pembayaran hutang pokok atau jangka waktu yang diperpanjang (Marlinah. Lilih, 2021).

Oleh karena itu, semua elemen harus bahu membahu memulihkan kondisi sosial ekonomi melalui pembentukan kepercayaan, komitmen bersama, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders) agar kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih optimal. Dalam kajian yang dilakukan terkait judul "Analisis Collaborative Government dalam Meningkatkan Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi: Kabupaten Sumbawa) menghasilkan tujuan yakni, untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Meningkatkan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan untuk mengetahui juga. Dampak dari Pemanfaatan Teknologi Digital Terhadap UMKM. Selain itu, pemerintah daerah harus mau mereformasi struktur pemerintahannya untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi yang terancam krisis, sehingga memiliki birokrasi yang lebih baik dan

fleksibilitas dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.

## II. METODE

Dalam menganalisis terkait dengan Analisis Collaborative Government dalam Meningkatkan Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi: Kabupaten Sumbawa), penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Model deskriptif kualitatif dinilai selaras dan cukup mendukung dalam menganalisa collaborative government dalam meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Model penelitian ini berguna untuk memeriksa secara objektif dan alamiah pada sebuah fenomena (Sugiono, 2009). Di sisi lain, pemanfaatan pendekatan kualitatif dinilai cukup representative dalam menganalisis dan memahami terkait collaborative government dalam meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Metode kualitatif berarti memahami sebuah fenomena sosial secara terperinci yang belum atau cenderung sedikit yang diketahui (Straus, 2003: 3-4). Metode kualitatif berguna sebagai panduan rincian yang lebih kompleks dan mendalam terkait sebuah fenomena sosial yang terjadi. Metode kualitatif juga sangat tepat guna memperoleh deskripsi dan interpretasi secara mendalam, hal ini juga yang mendasari penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam mengkaji tentang collaborative government dalam meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Sumbawa.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan lebih difokuskan pada studi literature atau studi kepustakaan, selain itu juga dengan metode wawancara, akan tetapi metode ini tidak dijadikan sebagai sumber data utama. Studi kepustakaan (Library Research) adalah sebuah studi yang digunakan saat mengumpulkan informasi serta data dengan bantuan dari berbagai macam material yang terdapat di perpustakaan misalnya buku, majalah, dokumen, jurnal, kisah-kisah sejarah, internet dan sejenisnya. Pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan ini digunakan oleh penulis berkenaan dengan kebutuhan serta kondisi sosial yang sedang terjadi. Diharapkan dengan metode penelitian yang digunakan mampu memberikan hasil maksimal dalam mengkaji dan memahami serta menganalisa terkait collaborative government dalam meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

## III. PEMBAHASAN

### **Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Meningkatkan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Terkait dengan perenominian ini, munculnya covid-19 sangat berdampak terhadap UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah). Dikarenakan UMKM

menjadi sektor paling rentan terkena hantaman pandemi virus corona. Maka dari itu upaya untuk mengantisipasi dampak pandemic ini terhadap perekonomian khususnya UMKM, pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional maupun stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Khusus untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat ‘memperpanjang napas’ UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Terdapat beberapa jenis PEN yang diluncurkan pemerintah. Yaitu, penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjamin. Untuk di Kabupaten Sumbawa, ada 7 program PEN. pertama, JPS (Jaring Pengaman Sosial) Gemilang NTB. Sebanyak 44 IKM/UMKM di Kabupaten Sumbawa yang terlibat dalam program ini. Mereka terdiri dari pelaku usaha abon ikan, kue kering, kopi, garam, ikan kering, minyak kayu putih, beras dan serbat jahe. Kedua, bantuan modal usaha bagi 20 pelaku usaha ultra mikro (UMI) di Kabupaten Sumbawa. Tiga, pemerintah juga memfasilitasi subsidi perizinan bagi KUMKM dengan alokasi 200 IKM/UKM di Kabupaten Sumbawa dengan rincian, PIRT sebanyak 50 IKM/UKM, MD sebanyak 50 IKM/UKM. Kemudian hak merk/hak cipta sebanyak 50 IKM/UKM, dan izin edar Alkes 50 IKM/UKM. Empat, memfasilitasi sertifikasi halal sebanyak 12 IKM/UKM. Kelima, bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) atau Bantuan Presiden (Banpres). Untuk mendapatkan bantuan ini, Pemda Sumbawa melalui Diskoperindag Sumbawa mengusulkan 10.436 UKM sebagai calon penerima BPUM Tahap I, dan 19.431 UKM calon penerima BPUM Tahap II. Tercatat, penyaluran bantuan dari tanggal 17 Agustus sampai 5 November 2020 sebanyak 22.653 UKM. keenam, yakni adanya pemberdayaan UMKM melalui pelatihan. Yaitu Diklat Wirausaha Pemula berbasis digital yang diikuti 34 UKM Pemula di Kabupaten Sumbawa dan Diklat Management Wirausaha Pemula yang diikuti 30 UKM. Kemudian yang terakhir terakhir, yakni program stimulus ekonomi dengan pembelian produk UKM seperti beras, abon ikan, dendeng manis, garam, minyak kayu putih, biskuit,

minyak sumbawa, madu, hand sanitizer, dan tas kemasan. “Sebanyak 1.231 orang penerima manfaat stunting,



**Gambar 1. Berita Pemulihan Ekonomi Nasional Solusi Bangkitnya UMKM di Masa Pandemi**

Berdasarkan data yang kami peroleh terkait Gambar 1. Menunjukkan bahwa dalam penerapan Collaborative Governance yang terjadi di Kabupaten Sumbawa dari pemaparan diatas menunjukkan kolaborasi yang nyata antara pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan masyarakat tervermin dalam 7 program PEN yang diterapkan di Kabupaten Sumbawa. Dengan pelaku UMKM sebagai sasaran utama guna meningkatkan perekonomian dan pemulihan ekonomi dimasa Pandemi Covid – 19. Dimana dalam program tersebut pemerintah menyediakan beberapa opsi atau pilihan pelaku usaha sesuai dengan apa yang mereka tekuni. Selain itu, program PEN yang diterapkan di Kabupaten Sumbawa tidak hanya menjadi wadah dalam pengembangan UMKM sendiri. Akan tetapi, terdapat manfaat PEN yang jika dilihat secara jelas program ini sangat membantu pelaku usaha khususnya pelaku UMKM dimana mereka sangat terbantu misalnya dalam hal pemberian modal oleh Negara atau pemberian legalitas usaha misalnya pemberian hak merk / hak cipta, pemberian stempel halal dan sekaligus memberikan pembinaan pelaku UMKM melalui diklat Management Wirausaha Pemula.



**Gambar 2. Berita Republika (PT PLN Bantu UMKM Cari Peluang di Tengah Pandemi)**

Berdasarkan Gambar 2. Terkait kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Masyarakat. Dalam hal ini PT. PLN selaku perusahaan Pemerintah memberikan wadah dalam pengembangan UMKM dimana PT. PLN memiliki program kemitraan (PK) yang bertujuan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Namun dalam program PT. PLN memberikan beberapa kriteria calon mitra binaan PK, diantaranya memiliki kekayaan paling banyak 500 juta atau memiliki hasil usaha maksimal Rp. 26 Miliar dan belum memenuhi persyaratan perbankan atau keuangan nonbank. Berikutnya telah melakukan usaha minimal enam bulan serta mempunyai prospek utama untuk dikembangkan.

Dalam hal ini, melihat pemaparan diatas menunjukkan bahwa kolaborasi yang disediakan oleh pemerintah sangatlah beragam terutama dalam kondisi pandemic saat ini. Program PK yang disediakan oleh PT. PLN diharapkan mampu memberikan dukungan pada mitra Usaha yang ingin bergabung seperti contoh UMKM Madu Lestari yang bertempat di Desa Semongkat, Kecamatan Batu Lanteh, Sumbawa.

### Dampak dari Pemanfaatan Teknologi Digital Terhadap UMKM

Pandemi ini memaksa masyarakat untuk lebih banyak di rumah, tentunya kondisi ini memaksa masyarakat untuk mencari alternative agar bisa berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka. Diharapkan juga kepada masyarakat harus semakin produktif mencari dan mewujudkan inovasi-inovasi, termasuk oleh UMKM agar produknya dapat dikenal dan laku di pasaran. Salah satunya dengan memanfaatkan

keberadaan teknologi. Inilah yang mendorong munculnya UMKM go Digital. Terdapat beberapa keuntungan penggunaan teknologi digital bagi UKM di Indonesia, yaitu dengan mengalami kenaikan pendapatan hingga 80% yang dimana satu setengah kali lebih mungkin untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kemudian 17 kali lebih mungkin untuk menjadi inovatif, dan juga UKM yang lebih banyak menggunakan teknologi digital menjadi lebih kompetitif secara internasional.



**Gambar 2. Webinar Manfaat Program PEN bagi UMKM, Kabupaten Sumbawa**

Karena dengan kita memanfaatkan teknologi digital, UKM dapat menjangkau pasar yang luas karena semua orang di seluruh Indonesia bahkan dunia dapat mengakses produknya dan melakukan transaksi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi digital maka akan dapat memangkas biaya, mengingat bisnis online dapat memangkas banyak jenis pengeluaran seperti sewa tempat dan lainnya. Tidak harus ada lokasi, karena UKM bebas menentukan lokasi bisnis karena transaksi dilakukan melalui media sosial atau internet. Disisi lain tentu banyak munculnya platform digital marketing UMKM guna untuk mendukung proses dan kinerja dari UMKM tersebut, mulai dari marketplace, facebook marketplace, google my business, facebook dan instagram ads, hingga website. Tentu dengan munculnya berbagai platform digital marketing tersebut syaratnya yakni dengan memiliki akses internet, memiliki alamat email, rekening bank dan produk yang dijual. Maka untuk mendukung semua itu, Kementerian Kominfo telah membangun infrastruktur telekomunikasi berupa site/BTS di 24 kecamatan wilayah Kabupaten Sumbawa yang jumlahnya mencapai 282 site. Dilihat dari pembangunan berupa infrastruktur ini, tentunya akses masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui sistem digital diharapkan dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Tentunya bentuk collaborative governance disini telah diberikan dan disediakan oleh pemerintah

Kabupaten Sumbawa itu sendiri dengan adanya UMKM go Digital ini maka masyarakat Kabupaten Sumbawa telah diberikan kemudahan dalam menjalankan UMKM mereka sehingga dapat meminimalisir dampak yang terjadi dan dialami oleh mereka sebagai masyarakat yang terdampak karena pandemi covid 19 tersebut. Dengan adanya bentuk dorongan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa maka disini sangat diperlukan feedback tersendiri dari masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan dengan baik atas apa yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa yakni berbagai platform digital marketing guna untuk mendukung proses kinerja dari UMKM yang ada di Kabupaten Sumbawa. Maka dengan adanya berbagai platform digital marketing ini akan menghasilkan input yang positif dan menimbulkan keefektifitasan yakni dapat meningkatkan pendapatan atau feedback yang cukup yakni hingga mencapai 80% yang dimana dengan adanya peningkatan ini dapat lebih mungkin untuk menciptakan kesempatan kerja itu sendiri dan juga dapat menghasilkan 17 kali lebih mungkin untuk menjadi inovatif serta UMKM yang lebih banyak memanfaatkan dan menggunakan teknologi digital ini akan lebih menjadi kompetitif tentunya dalam mendukung proses kinerja dari UMKM yang ada di Kabupaten Sumbawa itu sendiri.

#### IV. KESIMPULAN

Dalam meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid-19 ini tentu akan memerlukan kolaborasi dari pemerintah (Collaborative Governance). Collaborative Governance merupakan salah satu solusi dari birokrasi yang kaku dan tidak responsif dalam pemulihan kondisi sosial ekonomi di era new normal. Terciptanya sebuah komitmen, solidaritas, kohesi/keterikatan sosial, kepercayaan sosial akan menghasilkan public value yang bermanfaat bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan. pemerintah juga harus jelas dan tegas dalam mengkomunikasikan kebijakan new normal di masa pandemi ini dan merumuskan regulasi untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sumbawa selaku pembuat kebijakan memberikan suatu inovasi dalam meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic Covid – 19 dengan adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Meningkatkan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), seperti tujuh program PEN Pertama, JPS (Jaring Pengaman Sosial), kemudian kedua adanya bantuan modal usaha bagi 20 pelaku usaha Ultra Mikro (UMI), lalu ketiga difasilitasi subsidi perizinan bagi KUMKM, keempat memfasilitasi sertifikasi halal, kelima bantuan pelaku

usaha mikro (BPUM) atau bantuan presiden (Banpres), keenam adanya pemberdayaan UMKM, kemudian yang terakhir yakni adanya program stimulus ekonomi. Dan juga dengan adanya pemanfaatan teknologi digital, UKM ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas, dapat memangkas biaya. Serta banyak munculnya platform digital marketing UMKM guna untuk mendukung proses dan kinerja dari UMKM tersebut karena dilihat dari pengembangan dan pembangunan yang berupa infrastruktur ini, tentunya akses masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui sistem digital diharapkan dapat berjalan dengan baik dan efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya ). *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 5, 1–12.
- Marlinah. Lilih. (2021). Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021 Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021. *Memfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemuliahan Ekonomi Nasional*, 4(98), 73–78.
- Tri Sambodo, G., & Pribadi, U. (2016). Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052>
- Triandra, N., Hambali, D., Nurasia, & Rosalina, N. (2019). Analisis Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Kinerja Umkm (Studi Kasus Pada Umkm Di Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 6–10. <https://doi.org/10.37673/jebi.v4i1.259>
- Sugiono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Straus, A. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasrun, M. A. (2020). Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 32–40.
- Chris Ansell and Alison Gash. *Collaborative Governanance in Theory and Practice*, Berkeley: University of California, 2007

Haryono, N. 2012. Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, Th IV. No. 1

Puspitasari Gobel, Y. (2020). Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan Ndeas Model. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 209–223. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5809](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5809)

<https://tribun-sumbawa.com/> , diakses pada 20.30 Wita, 10 April 2021.

<http://uigm.ac.id/berita/detail/webinar-strategic-collaborative-governance--solusi-birokrasi-yang-kaku-dan-kurang-responsif-dalam-pemulihan-kondisi-sosial-ekonomi-di-era-new-normal> , diakses pada 20.00 Wita, 10 April 2021.

<http://www.diskominfotik.sumbawakab.go.id/>, diakses pada 20.20 Wita, 10 April 2021.

<http://diskominfotik.sumbawakab.go.id/berita/id/1242/pemulihan-ekonomi-nasional-solusi-bangkitnya-umkm-di-masa-pandemi.html> diakses pukul 15.00 Wita, 29 April 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=6EwZEZIZ8Tk&t=3885s> diakses pukul 22.00 Wita, 8 Mei 2021

<https://republika.co.id/amp/qhh17e380> diakses pukul 22.00 Wita, 8 Mei 2021

Sari, A. P., & Maryani, H. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi*, 3(1), 285–292.

Sitorus, A. P. S., Sidabutar, F. A., Simatupang, F. Y., Barri, A. A., & Chaniago, Y. (2025). Dampak Kebijakan Ppn Pada Daya Beli Masyarakat: Analisis Fenomenologis Persepsi Konsumen Dan Pelaku Umkm Di Medan. *Journal of Information Systems Management and Digital Business*, 2(3), 270–281. <https://doi.org/10.70248/jismdb.v2i3.2377>

Viera, J. J., Lee Hungu, A. H., Arief, A. P., Syahrani, A. N., & Siswajanthi, F. (2025). Dampak Kenaikan Pajak Ppn 12% Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dari Perspektif Pacasila. *Indonesian Journal of Islamic*